

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARIWISATA DI DESA KALIPUCANG KECAMATAN TUTUR KABUPATEN PASURUAN

^{*1} M. Daimul Abror, ^{*2} Roudotul Jannah

^{*1} Administrasi Publik Universitas Kadiri ^{*2} Administrasi Publik Universitas Yudharta
Pasuruan

^{*1} daimabrор@unik-kediri.ac.id, ^{*2} aikooana71@gmail.com

Artikel History

Submit: 25 July 2021

Review:

29 September 2021

Revised:

24 Oktober 2021

Accepted:

19 Desember 2021

Abstract: Kalipucang Village as one of the tourist village areas has tremendous potential in tourism development. However, the socio-economic conditions of the community tend to be relatively simple, so it is necessary to carry out an in-depth analysis related to the Implementation of Tourism Policy in Kalipucang Village, Tuttur District, Pasuruan Regency. The purpose of this study is to describe, analyze, and interpret the form of Tourism Policy Implementation in Kalipucang Village by referring to George and Edward III's implementation process model theory. This study uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of observation, interviews, with the Village Government, Pokdarwis and local communities as well as documentation. The results showed that the implementation of the tourism policy in Kalipucang Village had been implemented well. communication made by Policy Actors (Village Government) with the community is quite good with the openness of the problems faced. Natural resources are so abundant that the people of Kalipucang Village are enthusiastic in developing the Tourism Village so that it is more famous and visited by many domestic and foreign tourists. The problem faced by the people of Kalipucang Village is that the performance of each field, especially the tourism sector, is not optimal due to limited capital, inadequate tourism supporting facilities and infrastructure, and tourism destinations that are not well organized. Existing supporting factors include the variety of available tourism potential, support from local community leaders and administrators, collaboration between community members and the attitude of kinship and mutual cooperation which is still very strong. Meanwhile, from the practical implications of implementing tourism policies in Kalipucang Village, it shows positive economic and social changes, both from the aspect of tourism destinations, aspects of local icons, aspects of brotherhood and friendship and aspects of community welfare.

Keywords: Policy Implementation, Tourism Village, Community Welfare

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu Negara kepulauan terbesar didunia dan Negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya hingga seni budaya dan adat istiadatnya. Indonesia juga terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri dari beberapa kabupaten/kota. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada saat ini ditunjang oleh sektor-sektor unggulan yang sangat berperan untuk pembangunan ekonomi, salah satunya pada sektor pariwisata. Kebijakan pengembangan pariwisata di Indonesia, dalam pelaksanaannya sudah menitikberatkan pada adanya kolaborasi lintas actor baik antar jenjang pemerintahan maupun antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Bahkan kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mengeluarkan beberapa paket regulasi sebagai breakdown dari Undang-Undang tersebut, yakni Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Geopark sebagai Destinasi Pariwisata dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Bahkan secara khusus pengembangan Kawasan Strategis Nasional Bromo Tengger Semeru (KSNBTS) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi kawasan, Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2019 mengamanatkan adanya proses pembangunan yang terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kawasan.

Dengan demikian arah pembangunan kepariwisataan yang dimaksud akan berada dalam lingkup: 1) industri pariwisata, 2) destinasi pariwisata, 3) pemasaran dan 4) kelembagaan kepariwisataan dengan mengutamakan karakter lokal yang telah dimiliki.

Kabupaten Pasuruan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 yang kemudian diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 4 tahun 2021 tentang Desa Wisata yang menekankan adanya kawasan pembangunan pariwisata dan wisata pedesaan yang telah memiliki daya tarik. Seperti diamanatkan dalam peraturan daerah tersebut, terdapat kelompok daya tarik wisata yang menjadi kekuatan Kabupaten Pasuruan yakni: a) Kawasan Kabupaten Pasuruan

wilayah barat yaitu Kecamatan Sukorejo, Pandaan, Prigen dan Gempol sebagai kawasan pusat wisata alam, budaya, buatan, religi, edukasi, belanja dan kuliner; b) Kawasan Kabupaten Pasuruan wilayah tengah, yaitu Kecamatan Rembang, Wonorejo, Kejayan, Pohjentrek, Gondangwetan, sebagai kawasan industri, agro dan minat khusus; c) Kawasan Kabupaten Pasuruan wilayah timur, yaitu Kecamatan Grati, Lumbang, Winongan, Gondang wetan sebagai kawasan wisata alam, industri mebel dan religi; d) Kawasan Kabupaten Pasuruan wilayah utara yaitu Kecamatan Beji, Bangil, Kraton, Rejos, Lekok dan Nguling sebagai kawasan wisata budaya, belanja, kuliner, bahari dan religi; e) Kawasan Kabupaten Pasuruan wilayah selatan, yaitu Kecamatan Purwosari, Purwodadi, Tutur, Tosari, Puspo dan Pasrepan sebagai kawasan wisata alam, budaya, agro, kuliner, belanja dan edukasi.

Dengan demikian, melalui arah pembangunan yang telah ditetapkan, pembangunan kawasan dapat terwujud dengan memposisikan Bromo Tengger Semeru (BTS) sebagai daya tarik utama. Adapun ke-lima kawasan yang telah ditetapkan merupakan pionir dalam merespon daya tarik BTS dengan memanfaatkan daya tarik lokal yang tersedia. Setidaknya ada tiga peranan pariwisata di kawasan BTS yaitu peranan ekonomi, peranan sosial dan kebudayaan. Peranan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan pemerintah dan masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah berasal dari pembelanjaan dan biaya yang dikeluarkan wisatawan selama perjalanan dan persinggahannya seperti untuk hotel, makan dan minum, cenderamata, angkutan dan sebagainya.

Pengembangan pariwisata berpengaruh positif pada perluasan peluang usaha dan kerja. Peluang usaha dan kerja yaitu membuka peluang bagi masyarakat tersebut untuk menjadi pengusaha hotel, wisma, restoran, warung, angkutan dan lain-lain. Peluang usaha tersebut akan memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk bekerja dan sekaligus dapat menambah pendapatan untuk dapat menunjang kehidupan rumah tangganya. Salah satu permasalahan utama masih terbatasnya pengembangan BTS adalah terbatasnya koordinasi dan pengelolaan terpadu Kawasan BTS secara profesional.

Hal ini, salah satunya dikarenakan keterlibatan berbagai pihak baik dari pemerintah pusat melalui Kementrian kehutan, dan juga beberapa daerah sekitar BTS dalam pengelolaan Kawasan BTS yang belum bersinergi. Selain meningkatkan sinergitas antar pemangku kepentingan, pemerintah Kabupaten Pasuruan sangat berkepentingan dalam upaya pengembangan Kawasan di sekitar BTS. Oleh karena itu, diperlukan sebuah

kajian secara mendalam mengenai potensi dan pengembangan pariwisata khusus wilayah BTS. Dimana salah satu tujuannya adalah peningkatan perekonomian masyarakat sekitar dan juga perekonomian Kabupaten Pasuruan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016 – 2025. Oleh karena itu, kajian mengenai Pengembangan pariwisata khusus wilayah Bromo Tengger Semeru sangat penting dan perlu untuk dilakukan

Sektor pariwisata telah berkembang menjadi salah satu industri terbesar bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Melalui branding "Wonderful Indonesia" atau "Pesona Indonesia" diharapkan perkembangan pariwisata akan terus dapat meningkatkan kunjungan para wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara untuk mengunjungi destinasi wisata yang dimiliki oleh Indonesia, sehingga pariwisata di Indonesia dapat berpotensi sebagai penyumbang devisa Negara terbesar di Indonesia dan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Pasuruan yang berada dijalur strategis Surabaya-Malang dan Surabaya-Banyuwangi merupakan salah satu destinasi wisata di Jawa Timur yang memiliki kekayaan alam beraneka ragam. Berbagai jenis wisata mulai dari wisata pegunungan, wisata alam, wisata danau, dan wisata pantai siap menyambut kedatangan wisatawan domestik dan mancanegara. Untuk menyambut para wisatawan, sejumlah hotel berbintang, villa, penginapan dan homestay tersedia sebagai tempat istirahat yang nyaman.

Pesona Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu daerah yang berada di Kawasan Strategis Nasional Bromo Tengger Semeru (KSNBTS) menjanjikan beragam daya tarik wisata baik wisata alam, wisata minat khusus, wisata religi, wisata budaya, wisata buatan, maupun agrowisata. Secara umum, potensi ekonomi kecamatan tutur ditandai oleh keberadaan komoditas unggulan pertanian pada setiap destinasi wisatanya. Fakta tersebut semakin memperkuat bahwa potensi kecamatan tutur merupakan kecamatan dengan konsep dan brand pusat agrowisata yang tepat. Beberapa komoditas unggulan yang sudah siap dalam bentuk kemasan kegiatan pariwisata diantaranya adalah durian, kopi, bunga Krisan, sayur – sayuran, aneka buah – buahan, serta komoditas peternakan berupa aneka produk olahan susu. Kemudian terdapat potensi desa wisata Kalipucang yang menjanjikan sebagai destinasi agrowisata. Pada desa tersebut, telah terdapat beberapa atraksi wisata yang disediakan untuk wisatawan seperti di mana keseluruhan berbasis alam dan hasil produksi pertanian desa. Ditunjang oleh keberadaan homestay dan

pusat oleh – oleh membuat Desa ini semakin menjadi destinasi wisata potensial untuk lebih dikembangkan lagi di mana yang akan datang.

Kecamatan Tosari merupakan salah satu wilayah yang sangat dekat dengan BTS. Potensi ekonomi yang dimiliki adalah berbagai macam produk hasil pertanian khususnya sayur – sayuran. Tidak hanya itu, kecamatan tosari memiliki potensi ekonomi kreatif dalam bentuk usaha – usaha kerajinan, pahat dan seni ukir. Sejauh ini, meskipun belum di produksi dalam skala yang besar, potensi ekonomi kreatif ini sudah disandingkan Bersama aktivitas kepariwisataan sehingga menjadi daya tarik yang memiliki nilai tambah bagi destinasi wisata. Potensi lainnya adalah keberadaan homestay dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) lokal yang dapat dikembangkan agar menjadipusat oleh – oleh bagi wisatawan. Di masa yang akan datang potensi ini bisa diperkuat dengan kerja sama antar UMKM dan komunitas seperti Pasuruan Creartive Network (PANCENE) ataupun UMKM SMART yang sudah sedemikian maju sehingga mampu menghimpun produk secara terkoordinir melalui anggota komunitas yang dimaksud.

Kecamatan Puspo memiliki potensi yang cukup banyak namun belum kembangkan secara optimal. Sebagaimana kecamatan Tuter dan Puspo, Kecamatan Puspo memiliki kelimpahan produk pertanian khususnya sayur dan buah – buahan. Meskipun belum menjadikan kegiatan pertanian sebagai bagian dari pariwisata, secara ekonomi, Kecamatan Puspo dapat menjadi wilayah penopang yang berkontribusi menjadi pemasok komoditas oleh – oleh hasil pertanian serta olahannya. Adapun potensi lainnya adalah di beberapa titik destinasi wisata, terdapat kelompok pengusaha kecil menjual berbagai macam produk. Saat ini UMKM tersebut melakukan aktivitas usaha secara terpisah, namun demikian di masa yang akan datang, UMKM tersebut dapat menjadi penunjang bagi wilayah pariwisata Puspo maupun kecamatan lain disekitarnya.

Kecamatan Purwodadi menyimpan potensi ekonomi berupa pertanian serta olahannya turunannya khususnya yang berasal dari Desa Tambaksari. Secara spesifik, Desa tersebut menjadi pusat budidaya tanaman apelukat sehingga tidak hanya dapat dikembangkan sebagai agrowisata tetapi juga wisata edukasi. Adapun kebun Raya Purwodadi saat ini masih fokus pada fungsi konservasi tanaman sehingga belum menonjolkan hasil pertanian sebagai produk komersial.

Kecamatan Purwosari menyimpan potensi ekonomi berupa produk hasil pertanian, perkebunan dan peternakan. Keberadaan UPTD Budidaya Ternak, Desa Kertosari, Eduwisata Kembang Kuning dan Wisata Edukasi dan Resort Kebun Pak Budi memegang

peranan penting bagi kekuatan pariwisata kecamatan Purwosari di bidang ekonomi. Hal tersebut ditambah dengan keberadaan Saygon Park dan Rafting Kali Jempingan yang memberikan fasilitas wahana hiburan buatan dan akomodasi bagi wisatawan.

Kecamatan Sukorejo memiliki potensi ekonomi yang sangat khas yakni komoditas Matoa dan Kurma yang akan dibalut dalam tema agrowisata. Meskipun terbilang baru sebagai pelaku wisata, Kecamatan Sukorejo khususnya melalui Desa Wonokerto mempersiapkan diri untuk menjadi the city of matoa. Selain itu, produk kurma beserta komoditas olahannya juga sudah disiapkan sehingga satu – satunya pilihan untuk agrowisata Kurma adalah di wilayah Kecamatan Sukorejo

Adapun desa Kalipucang yang terletak 28 Kilometer arah Selatan dari pusat pemerintahan Kabupaten Pasuruan. Wilayah Desa Kalipucang berada di daerah dataran tinggi dengan ketinggian 500-1500 mdpl. Desa Kalipucang ini masuk dalam wilayah teritorial Kecamatan Tuttur dan tentunya masuk pada KSNBTS. Sebagian besar masyarakat Desa Kalipucang berprofesi sebagai peternak sapi perah. Akhir tahun 2016 silam jumlah peternak sapi 997 orang, dan populasi sapi perah sebanyak 2.613 ekor yang diakomodir melalui 7 kelompok ternak. Desa Kalipucang juga memiliki potensi sumberdaya alam lainnya, seperti perkebunan kopi, durian, air terjun Sumber Nyonya, 7 Sumber Telogo, Kebun Krisan, dan Bukit Tumang siap memanjakan pengunjung. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan pada awal 2017 berupaya merespon beberapa potensi alam dan sektor unggulan desa sebagai kawasan wisata potensial dengan membentuk Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS). (Nuzil, 2020).

Tabel 1. Potensi Daya Tarik Wisata di Kawasan TNBTS dan Kawasan SNBTS
Kabupaten Pasuruan

Jenis Destinasi Wisata	No	Nama Destinasi Wisata	Lokasi
Wisata Alam	1	Gunung Bromo	Desa Wonokitri, Kec Tosari
	2	Air Terjun Coban Jala	Desa Cowek, Kec. Puwodadi
	3	Air Terjun Rambut Moyo	Dusun Krajan, Desa
	4	Air Terjun Coban Waru	Dusun Kayubebek, Desa Wonosari, Kec. Tuttur
	5	Air Terjun Sumber Nyonya	Dusun Gunungsari, Kec. Tuttur
	6	Air Terjun Coban Cemoro Gading	Desa Ngadirejo, Kec. Tuttur

	7	Air Terjun Lebak Rejo	Desa Lebak Rejo, Kec. Purwodadi
Wisata Minat Khusus	1	Desa Wisata Puspo	Kecamatan Puspo
	2	Desa Wisata Tambaksari	Desa Tambaksari, Kec. Purwodadi
	3	Desa Wisata Wonokitri	Desa Wonokitri, Kec. Tosari
	4	Desa Wisata Ngadiwono	Desa Ngadiwono, Kec. Tosari
	5	Desa Wisata Mororejo	Desa Mororejo, Kec. Tosari
	6	Desa Wisata Baledono	Desa Baledono, Kec. Tosari
	7	Desa Wisata Wonosari	Desa Wonosari, Kec. Tuttur
	8	Desa Wisata Ngembal	Desa Ngembal, Kec. Tuttur
	9	Desa Wisata Tlogosari	Desa Tlogosari, Kec. Tuttur
	10	Desa Wisata Andonosari	Desa Andonosari, Kec. Tuttur
	11	Desa Wisata Tuttur	Desa Tuttur, Kec. Tuttur
	12	Desa Wisata Kalipucang	Desa Kalipucang, Kec. Tuttur
	13	Desa Wisata Blarang	Desa Blarang, Kec. Tuttur
	14	Desa Wisata Ngadirejo	Desa Ngadirejo, Kec. Tuttur
	15	Desa Wisata Cowek	Desa Cowek, Kec. Purwodadi
	16	Desa Wisata Dawuhan Sengon	Desa Dawuhan Sengon, Kec. Purwosari
	17	Desa Wisata Palangsari	Desa Palangsari, Kec. Puspo
	18	Desa Wisata Kertosari	Desa Kertosari, Kec. Purwosari
Wisata Religi	1	Pertapaan Abiyoso	Desa Tambaksari, Purwoadi
Wisata Budaya	1	Candi Sepilar	Desa Tambaksari, Purwoadi
	2	Candi Makutoromo	Desa Tambaksari, Purwoadi
	3	Candi Wesi	Dusun Tambakwatu, Desa Tambaksari, Kec. Purwoadi
	4	Candi Gong	Dusun Tambakwatu, Desa Tambaksari, Kec.

			Purwoadi
Wisata Buatan	1	Kebun Raya	Purwodadi
	2	Saygon Waterpark	Sengon, Kec. Purwosari
	3	Kolam Renang Taman Ria Suropati	Desa Ronggeh, Kec. Gondang Wetan
Agrowisata	1	Bhakti Alam	Dusun Ngembal, Kec. Tutur
	2	Agrowisata Apel	Desa Andosari, Kec. Tutur
	3	Agro Bunga Krisan dan Paprika	Desa Telogosari, Kec. Tutur
	4	Wisata Peternak Sapi Perah	Desa Wonosari, Kec. Tutur
	5	Agro Jamur	Desa Ngadirejo, Kec. Tutur
	6	Bukit Flora	Dusun Ngembal, Kec. Tutur
	7	Kebun Kurma	Dusun Canggih, Desa Sekar Mojo, Kec. Purwosari

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, 2021

Sebagai salah satu kawasan industri pariwisata yang cukup menarik banyak wisatawan lokal maupun asing, kawasan Pasuruan diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat desa tertinggal dengan memaksimalkan potensi desa tersebut. Namun banyaknya potensi yang dimiliki oleh desa-desa terpencil Kabupaten Pasuruan tidak berimbang dengan sumber daya manusia setempat sehingga potensi tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Minimnya biaya operasional juga merupakan salah satu faktor penghambat sehingga potensi tersebut tidak dapat dioptimalkan. Karena hal inilah peranan pemerintah Kabupaten Pasuruan sangatlah penting. Untuk itu pemerintah harus memiliki strategi untuk meningkatkan potensi lokal desa di Kabupaten Pasuruan.

Metodologi

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata daripada deretan angka-angka. Metode kualitatif ini senantiasa menjadi bahan utama bagi ilmu-ilmu sosial tertentu, terutama dalam bidang antropologi, sejarah, dan ilmu politik. Penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh

data-data mengenai Implementasi Kebijakan Pariwisata di Desa Kalipucang Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan.

Penelitian ini di fokuskan pada proses Implementasi Kebijakan Pariwisata di Desa Kalipucang Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan berdasarkan pendekatan yaitu : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Lokus penelitian yang dilakukan ini di Desa Kalipucang Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan. Peneliti tertarik mengambil tempat ini karena Implementasi Kebijakan Pariwisata yang berupa Desa Wisata sudah di tetapkan dan dilaksanakan di lapangan.

Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala desa, perangkat desa, dan kelompok peternak sapi desa, maupun observasi langsung dilapangan. Sedang data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari informan dilapangan. Sumber data sekunder ini bisa berupa dokumen, artikel, maupun arsip-arsip yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Pariwisata di Desa Kalipucang Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan. Data yang diperoleh berasal dari beberapa artikel yang terkait Implementasi Kebijakan Pariwisata di Desa Kalipucang Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan sehingga banyak menjadi referensi kami dalam melakukan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 2 cara yaitu:

- a) Wawancara. Moleong (2010:186) mengungkapkan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan dengan dua belah pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan Pemerintah Desa Kalipucang berdasarkan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya.
- b) Dokumentasi adalah mengumpulkan sejumlah dokumen yang diperlukan sebagai bahan data informasi sesuai dengan masalah penelitian. Dengan cara mempelajari buku-buku, teori-teori, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang diperlukan dan berkaitan dengan masalah yang di teliti.
- c) Observasi. Nasution (Sugiyono, 2010:310) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para peneliti hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung di Desa Kalipucang.

Teknis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui Reduksi Data (Data Reduction), Display Data (Data Display), dan Penggambaran Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) (Miles, 2014).

Hasil Penelitian

Profil Desa Kalipucang

Wilayah Desa Kalipucang terletak pada wilayah dataran tinggi dengan ketinggian 840 meter dpl dan luas 671,178 Hektar, dengan batas-batas wilayah, sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Sumberpitu.
- b. Sebelah Timur : Desa Jajangwulung dan Desa Andonosari.
- c. Sebelah Selatan : Desa Tuttur dan Desa Pungging
- d. Sebelah Barat : Desa Tuttur dan Desa Dawuhan Sengon.

Desa Kalipucang terdiri dari 6 Dusun, 7 RW (Rukun Warga) dan 26 RT (Rukun Tetangga). Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dusun Kuntul Selatan : 1 RW dan 5 RT
- b. Dusun Kuntul Utara : 2 RW dan 6 RT
- c. Dusun Dodogan : 1 RW dan 4 RT
- d. Dusun Mucangan : 1 RW dan 4 RT
- e. Dusun Cikur : 1 RW dan 4 RT
- f. Dusun Jelak : 1 RW dan 3 RT

Jumlah penduduk Desa Kalipucang sebanyak 4.272 jiwa yang tersebar di 6 Dusun, 7 RW dan 26 RT, dari jumlah tersebut terdiri dari penduduk laki-laki 2.311 jiwa dan penduduk perempuan 1.961 jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata selama 5 (Lima) tahun terakhir 0.5 %, dengan tingkat kepadatan sebesar 342,70 jiwa/km². Sedangkan Pusat pemerintahan Desa Kalipucang terletak di Dusun Dodogan dengan menempati areal lahan seluas 1.000 m². Jarak Desa Kalipucang dengan pusat Pemerintahan Kecamatan Tuttur ± 4 Km.

Tabel 2. Penggunaan Lahan di Desa Kalipucang

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Pemukiman	120,78
2	Tegal/ Ladang	399
3	Hutan	5
4	Perkebunan	4,56
5	Kuburan	2,5
6	Pekarangan	2
7	Taman	-
8	Perkantoran	0,5
9	Prasarana Umum Lainnya	1
	Luas Wilayah	535,34

Implementasi Kebijakan Pariwisata di Desa Kalipucang

Pengertian pariwisata menurut A.J Burkat dalam Damanik (2006), pariwisata adalah perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan diluar tempat dimana mereka biasa hidup dan bekerja dan juga kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di suatu tempat tujuan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, bahwa keadaan alam, flora, dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa serta peninggalan sejarah, seni, dan juga budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan Desa Wisata merupakan pengembangan suatu wilayah desa yang pada dasarnya tidak merubah apa yang sudah ada, akan tetapi lebih cenderung kepada pengembangan potensi desa yang ada dengan melakukan pemanfaatan kemampuan unsur-unsur yang ada di dalam desa yang berfungsi sebagai atribut produk wisata dalam skala yang kecil menjadi rangkaian aktivitas atau kegiatan pariwisata dan mampu menyediakan serta memenuhi serangkaian kebutuhan perjalanan wisata baik dari aspek daya Tarik maupun sebagai fasilitas pendukung. (Muljadi, 2012).

Pengembangan pariwisata merupakan peran yang sangat penting bagi pembangunan suatu wilayah dan tidak bisa lepas dari kebijakan-kebijakan yang dibuat. Hal tersebut akan menjadi acuan untuk pengembangan pariwisata kedepan supaya pembangunan dan

pengembangan pariwisata bisa berjalan terarah dan sesuai dengan rencana. Kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pasuruan dalam pelaksanaannya sudah menitikberatkan pada kolaborasi actor lintas sector baik antar jenjang pemerintah maupun antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat sipil sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Pembangunan pariwisata di Indonesia maupun di mancanegara menunjukkan kecenderungan terus meningkat.

Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki banyak potensi sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan serta kelautan. Desa Kalipucang, Kecamatan Tuttur, Kabupaten Pasuruan berada di kawasan lereng gunung bromo. Dengan jumlah penduduk 4.272 jiwa, 90 persen merupakan peternak sapi. Tersebar di Dusun Kuntul Selatan, Kuntul Utara, Dodogan, Cikur, Mucangan dan Jelag. Populasi sapi mencapai 2 ribu ekor dengan total produksi susu per hari 12 ribu ekor dengan total produksi susu per hari 12 ribu liter. Kekayaan alam tak bisa dilepaskan dari kondisi alam yang eksotik dan campur tangan penjajah Belanda saat masuk kawasan Nongkojajar pada tahun 1911.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pembuatan keputusan, seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan, atau keluarnya standar standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa implemetasi kebijakan pada substansinya adalah cara yang tepat untuk melaksanakan agar sebuah kebijakan yang baik dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan. (Yulianto, 2015).

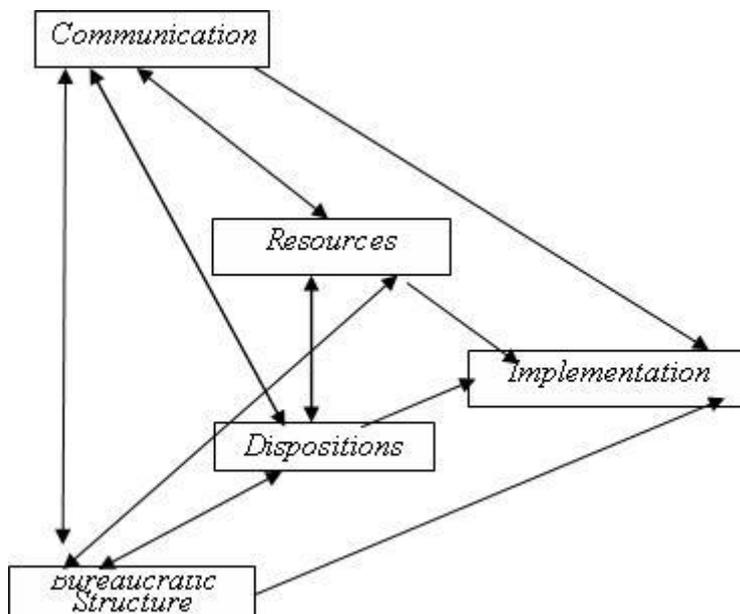
Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. (Hayat, 2018)

Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George dan Edward III menunjuk pada empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut diantaranya:

- a. Komunikasi. Yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group).
- b. Sumber Daya. Yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial.
- c. Disposisi. Yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis.
- d. Struktur Birokrasi. Yaitu menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting yaitu mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri.

Keempat variabel di atas dalam model yang dibangun oleh George Edward III memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. (Indiahono, 2009).

Gambar 1: Implementasi Kebijakan Publik Model George Edward III



Desa Kalipucang memiliki segudang potensi unggulan desa seperti Budaya, Wisata, Paket Tracking Bromo, dan Agrobisnis. Terhitung mulai 2015 hingga saat ini, Desa Wisata Kalipucang dijadikan sebagai Kampung Susu oleh pemerintah. Kampung susu memfokuskan pada edukasi sapi perah dari hulu ke hilir. Berbagai edukasi mulai dari

perawatan sapi, pemerahan susu, pengolahan susu hingga menikmati susu segar, dijadikan sebagai destinasi wisata edukatif untuk disajikan kepada wisatawan.

Awal 2017 direncanakan sebagai desa wisata. Untuk menggali potensi desa, mereka di damping avveroes. Lantas dibentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kalipucang Alam Lestari. Awalnya, warga bergotong royong membersihkan obyek wisata dan swadaya mengelolanya. Mulai 2018 dianggarkan masing-masing Rp. 1 Juta di setiap obyek wisata. Dana tersebut dialokasikan dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDDes) Kalipucang total sebesar Rp 1,2 Miliar. Dalam pengelolaannya Pokdarwis Alam Lestari bekerjasama dengan berbagai pihak. Pengelolaan Bukit Tumang bekerjasama dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Kampung Susu dengan Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) dan Omah Kopi dengan kelompok tani. Kemudian pada tahun 2019 dalam SK Bupati Pasuruan meresmikan Desa Kalipucang sebagai Desa Wisata.

Berangkat dari fokus permasalahan yang telah dirumuskan di atas mengenai proses Implementasi Kebijakan Pariwisata di Desa Kalipucang dengan menggunakan Teori George Edward III diantaranya sebagai berikut :

a. Komunikasi.

Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pariwisata di Desa Kalipucang dilakukan antara masyarakat dan Pemerintah Desa. Dilihat dari komunikasi antar aktor kebijakan pariwisata di Desa Kalipucang sudah cukup baik. Adanya saling keterbukaan antara Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Kalipucang. Begitu juga dengan masyarakat Desa Kalipucang, mereka tidak sungkan-sungkan untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan mereka, dan Pemerintah Desa sangat responsif akan keluhan atau kebutuhan masyarakat sehingga adanya kemudahan dalam mengembangkan potensi wisata yang ada.

b. Sumber Daya

Organisasi atau orang yang menggunakan sumber daya untuk beragam kegiatan pariwisata misalnya di tempat kerja disebut sebagai operator (tenaga kerja) pariwisata menggunakan sumber daya manusia, fasilitas dan peralatan (sumber daya fisik), menyediakan atraksi budaya sebagai daya Tarik wisatawan (sumber daya budaya), dan menjual pemandangan alam sebagai atraksi wisata (sumber daya alam). Majunya suatu wisata tentu tidak lepas dari sumber daya yang sangat berkompeten di dalamnya seperti yang tercantum dalam teori George Edward III.

Desa Kalipucang merupakan Desa Wisata, dimana Desa Kalipucang dikatakan Desa yang sangat pesat perkembangannya. Hal tersebut di dukung oleh Sumber Daya

Alam (SDA) yang cukup melimpah meliputi pohon cengkeh, pohon kopi, pohon durian, pohon pisang, pohon sengon dan masih banyak lagi hasil perkebunan di desa Kalipucang. Jika dilihat dalam atraksi budayanya, di Desa Kalipucang memiliki budaya diantaranya kesenian pencak silat, ojung, tari remo, dan rampok kentongan.

Tabel 3. Sumber Daya Alam di Desa Kalipucang

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Sungai	5000	Meter
2	Sumber Air	33	Titik
3	Air Terjun	2	Buah
4	Kebun Tanaman Pertanian:		
	a. Apel	-	Hektar
	b. Paprika	-	Hektar
	c. Bunga Krisan		Hektar
	d. Kentang	-	Hektar
	e. Kobis	-	Hektar
	f. Kembang Kol	-	Hektar
	g. Bawang	-	Hektar
	h. Wortel	-	Hektar
	i. Jagung	2	Hektar
	j. Cemara	-	Hektar
	k. Kopi	32	Hektar
	l. Durian	1,5	Hektar
	m. Sengon Laut	-	Hektar
	n. Rumput Gajah	54	Hektar
	o. Cengkeh	6	Hektar
	p. Lombok	1	Hektar
	q. Tomat	-	Hektar
5	Ternak Sapi Perah	27000	Ekor
6	Hutan Pinus	-	Hektar
7	Wisata Alam	3	Tempat

Tabel 4. Sumber Daya Sosial Budaya di Desa Kalipucang

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Volume	Satuan
1	Seni Hadrah	-	Grup
2	Albanjari	4	Grup
3	Jami'yah Tahlil	26	Kelmp
4	Jam'iyah Dibak	12	Kelmp
5	Terbang Jidor	-	Kelmp
6	Kuda Lumping/ Jaranan	1	Grup
7	Reog	-	Grup
8	Pencak Silat	3	Grup
9	Selamatan Desa	1	Kali/ tahun
10	Ludruk	-	Grup
11	Wayang Kulit	-	Grup

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Volume	Satuan
12	Mocopat	-	Grup
13	Barik'an	-	Kali/ tahun
14	Pethik	-	Kali/ tahun
15	Kegiatan Adat	-	Kali/ tahun
16	Pokdarwis	1	Kelmp
17	Kelompok Tani	5	Kelmp
18	Gapoktan	-	Kelmp
19	HIPPAM	3	Kelmp
20	Sepakbola	2	Klub
21	Bulutangkis	-	Klub
22	Bola Volley	3	Klub
23	Sepeda	1	Klub

c. Disposisi

Kecenderungan atau sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan pariwisata berperan penting dalam sukses tidaknya suatu kebijakan. Karena sudut pandang seseorang berbeda dalam suatu hal. Dalam hal disposisi dalam Implementasi Kebijakan Pariwisata di Desa Kalipucang sudah seutuhnya mendukung dan menjalankan tupoksinya dengan baik. Namun dalam hal pengembangan destinasi wisata yang dijalankan oleh Pemerintah Desa masih banyak hambatan-hambatan yang menjadi tugas rumah Pemerintah Desa seperti fasilitas yang belum memadai, pendanaan hanya bersumber dari APBDes, kurangnya promosi serta belum ada investor yang ikut bergabung dalam pengembangan objek wisata di Desa Kalipucang. Semua gejala-gejala ini menjadi faktor kurang maksimalnya pengembangan destinasi wisata di Desa Kalipucang terhadap kesejahteraan masyarakat.

d. Struktur Birokrasi

Agar proses yang ada dalam birokrasi dapat berjalan dengan konsisten, efektif dan efisien sehingga tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada. Struktur birokrasi dibagi menjadi 2 yaitu : Standar Operasi Prosedur (SOP) dan penyebaran tanggung jawab. Dalam konteks implementasi kebijakan pariwisata yang ada di Desa Kalipucang, SOP dan tanggung jawab mengatur destinasi wisata yang ada di Desa Kalipucang sudah berjalan dengan baik. Mereka berpedoman berdasarkan tugas pokok dan fungsi sehingga mereka membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang sudah mengerti tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, dan di dalam Pokdarwis tersebut juga memiliki sub-sub bidang yang lebih terinci yang memiliki tugas dalam mengembangkan pariwisata di Desa Kalipucang. Termasuk Pemerintah

Desa juga ikut andil dalam mendukung pengembangan destinasi wisata di Desa Kalipucang.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Implementasi Kebijakan Pariwisata di Desa Kalipucang dipengaruhi oleh beberapa faktor, dimana terdapat faktor pendukung dan penghambat. Beberapa faktor pendukungnya adalah :

- a. Keindahan alam yang dimiliki. Hamparan lahan perkebunan yang luas serta udara yang sejuk. Mayoritas penduduk yang bermatapencaharian bertani dan beternak sapi juga memberikan daya Tarik tersendiri.
- b. Kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata (pemerintah, pihak swasta dan masyarakat) sudah siap menerima perkembangan desanya sebagai kawasan wisata. Responsif dan dukungan penuh dari masyarakat Desa Kalipucang dalam mengembangkan wisata menjadi nilai tambah untuk menarik wisatawan berkunjung atau menarik pengusaha dan investor.
- c. Adanya persaingan yang sehat antar petani dan peternak sapi berakibat pemerataan pendapatan. Masyarakat akan berlomba-lomba berinovasi menciptakan produk-produk dari hasil pertanian atau perkebunan mereka yang nantinya akan berdampak pada persaingan usaha yang sehat,

Sedangkan faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pariwisata di Desa Kalipucang adalah :

- a. Kurangnya kelengkapan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata yang belum diperbaikinya menuju wisata air terjun Sumber Nyonya, 7 (tujuh) Sumber Telogo, Bukit Tumang, serta menuju lahan perkebunan. Sarana dan prasarana merupakan hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan kegiatan promosi.
- b. Keterbatasan modal yang menghambat kemajuan usaha yang dialami petani dan peternak sapi serta komunitas karang taruna dalam pengembangan wisata Desa Kalipucang sehingga tidak bisa berjalan dengan optimal.

Implikasi Praktis Implementasi Kebijakan Pariwisata di Desa Kalipucang

Setiap kebijakan public yang diimplementasikan di suatu kawasan pasti membawa implikasi praktis baik yang sifatnya positif maupun negatif. Dalam konteks penelitian ini implikasi dari kebijakan pariwisata di desa Kalipucang diantaranya:

- a. Dari aspek tujuan kepariwisataan bahwa di desa Kalipucang mampu memberikan peluang dan tantangan bagi warga desa setempat dalam peningkatan taraf perekonomian dari hasil susu sapi yang dikelola secara kolaboratif antara pemerintah desa dan kelompok peternak sapi desa setempat. Peluang pada peningkatan taraf perekonomian sangat membantu kelompok peternak sapi dalam bargaining harga dengan pihak industri INDOLAKTO sebagai pihak yang menjadi mitra pengambil hasil panen kelompok peternak. Namun disisi lain faktor keterbatasan pengetahuan keorganisasian dan juga pemanfaatan limbah ternak menjadi tantangan bersama bagi pemerintah desa kalipucang dan warga desa setempat, karena selama ini masih belum termanfaatkan dengan baik
- b. Dari aspek ikon kelokalan, implementasi kebijakan pariwisata di desa Kalipucang berimplikasi positif bagi promosi desa, dimana desa kalipucang lebih dikenal sebagai desa wisata susu sapi.
- c. Dari aspek persaudaraan dan persahabatan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini mampu mendorong warga desa setempat untuk saling berkomitmen memajukan usaha mereka dengan membentuk wadah kelompok peternak sapid an pihak desa menyediakan Koperasi Usaha Desa (KUD) sebagai wujud advokasi pemerintah desa terhadap kepentingan warga desa dalam mengembangkan usahanya.
- d. Dari aspek kesejahteraan masyarakat, terbukti dengan adanya implementasi ini, warga desa setempat lebih meningkat kesejahteraannya karena usaha mereka diadvokasi oleh pemerintah desa setempat dan juga warga mampu mengemas usaha mereka dengan pengembangan promosi di edukasi susu sapid an juga pengenalan budaya gotong royong yang tercermin dengan adanya kelompok peternak sapi.

Kesimpulan

Berdasarkan teori George Edward III implementasi kebijakan memiliki empat variabel. dan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa Implemetasi Kebijakan Pariwisata di Desa Kalipucang melalui Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi sudah cukup berjalan dengan baik karena adanya saling keterbukaan antara Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Kalipucang, sumber daya alam yang melimpah, serta struktur birokrasi yang sudah cukup berjalan dengan baik antara aparatur desa yang turut andil dalam berbagai bidang yang dilakukan oleh masyarakat. Pelaksanaan tersebut tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung dalam

Implementasi Kebijakan Pariwisata di Desa Kalipucang yaitu keindahan alam yang dimiliki, Hamparan lahan perkebunan yang luas serta udara yang sejuk. Mayoritas penduduk yang bermatapencaharian petani dan peternak sapi juga memberikan daya Tarik tersendiri. Kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata (pemerintah, pihak swasta dan masyarakat) sudah siap menerima perkembangan desanya sebagai kawasan wisata.

Responsif dan dukungan penuh dari masyarakat Desa Kalipucang dalam mengembangkan wisata menjadi nilai tambah untuk menarik wisatawan berkunjung atau menarik pengusaha dan investor. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pariwisata di Desa Kalipucang yaitu Kurangnya kelengkapan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata yang belum diperbaikinya menuju wisata air terjun Sumber Nyonya, 7 (tujuh) Sumber Telogo, Bukit Tumang, serta menuju lahan perkebunan. Sarana dan prasarana merupakan hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan kegiatan promosi. Keterbatasan modal yang menghambat kemajuan usaha yang dialami petani dan peternak sapi serta komunitas karang taruna dalam pengembangan wisata Desa Kalipucang sehingga tidak bisa berjalan dengan optimal. Selain itu, Implikasi Praktis dari Implementasi Kebijakan Pariwisata di Desa Kalipucang menunjukkan adanya perubahan ekonomi dan sosial yang positif baik dari aspek tujuan kepariwisataan, aspek ikon kelokalan, aspek persaudaraan dan persahabatan serta aspek kesejahteraan masyarakat

Adapun rekomendasi dari peneliti untuk Pemerintah Desa diharapkan bisa mengatur Dana Desa (DD) supaya bisa di alokasikan untuk pengembangan destinasi wisata yang sarana dan prasarannya masih belum memadai. Rekomendasi dari peneliti untuk Masyarakat Desa Kalipucang dan juga Pokdarwis supaya lebih giat lagi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan untuk terus mengembangkan destinasi wisata yang ada di Desa Kalipucang.

Daftar Pustaka

Hayat. (2018). *Kebijakan Publik Evaluasi, Reformasi, Formulasi*. Malang: Intrans Publishing.

Indiahono, D. (2009). *Perbandingan Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Kumparan.com "Melihat Lebih Dekat Potensi Wisata di Desa Kalipucang ". 26 Maret 2018. di akses di [HYPERLINK "https://m.kumparan.com/kabarpasuruan/melihat-lebih-dekat-potensi-wisata-](https://m.kumparan.com/kabarpasuruan/melihat-lebih-dekat-potensi-wisata-)

di-desa-kalipucang" <https://m.kumparan.com./kabarpasuruan/melihat-lebih-dekat-potensi-wisata-di-desa-kalipucang>

Miles, M. A. (2014). *Qualitative data analysis A methods sourcebook*. Ed.3. america: sage publications.

Moleong, L.J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya

Muljadi. (2012). *Kepariwisataan dan Perjalanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nuzil, N. R. (2020). *Pengembangan Kawasan Agroeduwisata Berbasis Potensi Unggulan Desa*. Media Trend.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Geopark sebagai Destinasi Pariwisata

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik,- Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2025

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 4 tahun 2021 tentang Desa Wisata

Surat Keputusan Bupati Pasuruan Tahun 2019 Tentang Penetapan Desa Kalipucang Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan Sebagai Desa Wisata Kalipucang

Surya.co.id, " Raih Predikat Kampung Susu, Desa Wisata Kalipucang Pasuruan Terus Kembangkan Konsep Wisata Edukasi ". 11 November 2019 diakses di HYPERLINK "<https://surabaya.tribunnews.com./2019/11/11/raih-predikat-kampung-susu-desa-wisata-kalipucang-pasuruan-terus-kembangkan-konsep-edukasi-wisata>" <https://surabaya.tribunnews.com./2019/11/11/raih-predikat-kampung-susu-desa-wisata-kalipucang-pasuruan-terus-kembangkan-konsep-edukasi-wisata> .

Sugiyono. 2010. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Yulianto, K. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: UNG Press.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution -ShareAlike 4.0 International (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).